



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI PAPUA BARAT**

**MASA RESES  
MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2021 – 2022**

**TANGGAL 8 S.D. 12 OKTOBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, OKTOBER 2021**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN I**  
**TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**TANGGAL 8 s.d. 12 OKTOBER 2021**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan penanggulangan pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah risiko resesi ekonomi saat ini.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam penanggulangan pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

### **1.2 Dasar Kegiatan**

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 19 Agustus 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan potensi adanya resesi ekonomi.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di tengah-tengah pandemi COVID-19.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Papua Barat.

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Papua Barat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global.

#### **I.4 Kegiatan**

Pertemuan dengan Bupati Sorong dan jajaran Pemerintah Kota Sorong yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke salah satu kabupaten untuk melihat langsung perkembangan pengendalian pandemi khususnya untuk percepatan pembukaan destinasi wisata dunia.

- A. Pertemuan dengan Waikota Sorong dan instansi terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, Jaminan Sosial dan lain-lain, yaitu:
  1. Walikota Sorong
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kadinkes Kota Sorong
  3. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disdukakertrans) Provinsi Papua Barat dan Kadisnakertrans Kota Sorong
  4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat
  5. Direktur RSUD Provinsi Papua Barat
  6. Direktur RSUD Selebesolu Kota Sorong
  7. Kepala BPJS Kesehatan Kedeputian Papua dan Papua Barat
  8. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara dan Papua (Balinuspa), Kepala kantor cabang Sorong
  9. Kepala Balai POM Manokwari
  10. Kepala BLK Manokwari dan Kepala BLKI Sorong
- B. Pertemuan dengan Bupati Raja Ampat beserta membahas perkembangan penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Raja Ampat
- C. Peninjauan ke RSUD Sele Be Solu Kota Sorong

#### **I.5. Tim Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Bapak Immanuel Melkiades Laka Lena.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

<b>N</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>DAPIK</b>
1.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA	KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX	GOLKAR	NTT II
2.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	WK. KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
3.	Dra. ELVA HARTATI, SIP., MM	ANGGOTA	PDIP	BENGKULU
4.	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	GERINDRA	SUMSEL II
5.	RAMSON SIAGIAN	ANGGOTA	GERINDRA	JATENG X
6.	RATU NGADU BONU WULLA, S.T	ANGGOTA	NASDEM	NTT II
7.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M	ANGGOTA	PKB	JATENG IX
8.	Ir. NUR YASIN, MBA, M.T	ANGGOTA	PKB	JATIM IV
9.	Sy. ANAS THAHIR	ANGGOTA	PPP	JATIM III

## II. GAMBARAN UMUM

### 2.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Barat

Papua Barat adalah provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papu. Ibukotanya adalah Manokwari dengan kota terbesarnya Sorong. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Secara administrative, provinsi Papua Barat wilayah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 154 distrik, dan 1.361 kampung dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 97.024,37 km<sup>2</sup> (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008).

Secara geografis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10-100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnya berkisar antara 10-50 meter diatas permukaan laut. Batas geografis Provinsi Papua Barat adalah:

Sebelah Utara	: Samudera Pasifik
Sebelah Selatan	: Laut Banda (Provinsi Maluku)
Sebelah Barat	: Laut Seram (Provinsi Maluku)
Sebelah Timur	: Provinsi Papua



Gambar 1. Peta Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Perancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.

## **Kabupaten Raja Ampat**

Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ibukota kabupaten Raja ini terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Empat di antaranya, yakni Pulau Misoo, Salawati, Batanta dan Waigeo merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Kabupaten ini memiliki total luas 67.379,60 km<sup>2</sup> dengan rincian luas daratan 7.559,60 km<sup>2</sup> dan luas lautan 59.820,00 km<sup>2</sup>.

Raja Ampat sudah terkenal, baik nasional maupun internasional sebagai destinasi wisata dan menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadikan Raja Ampat sebagai bagian dari tujuan wisata dunia. Saat ini Raja Ampat sebagai destinasi wisata menjadi salah satu sumber PAD daerah.

### **2.3 Kondisi ekonomi**

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tentang Perekonomian Papua Barat, pada triwulan I 2021 perekonomian Papua Barat diperkirakan tumbuh positif dan meningkat dibanding perkiraan triwulan IV 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi triwulan IV 2020 diperkirakan rendah yang kemudian berimplikasi pada arah ekonomi pada triwulan I 2021. Ekonomi pada triwulan I 2021 diperkirakan akan didorong oleh pulihnya sebagian besar sektor ekonomi.

Inflasi Papua Barat pada triwulan I 2021 diperkirakan meningkat dibanding perkiraan inflasi pada triwulan IV 2020. Kendati meningkat, inflasi diperkirakan masih berada dalam level yang rendah. Peningkatan inflasi ditengarai karena meningkatnya aktivitas ekonomi sehingga mendorong permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa. Peningkatan secara umum akan menggerakkan inflasi inti (core inflation). Sementara, inflasi kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food) diperkirakan sedikit meningkat setelah tercatat rendah pada 2020. Inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) akan dipicu oleh perkiraan meningkatnya tarif angkutan udara setelah pada 2020 tercatat rendah.

Ekonomi Provinsi Papua Barat pada Q2-2021 berkontraksi -2,39% (YoY), jauh lebih rendah dari Nasional 7,07%. Dari sisi Lapangan Usaha: Sektor Industri Pengolahan dengan share terbesar (23,89%) mengalami kontraksi -9,79%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi ada di sektor Transportasi dan Pergudangan dengan share 2,61% tumbuh 13,18%. Pemerintah mendorong adanya penguatan aktivasi Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong.

### **2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia dikatakan mengalami kemajuan jika aspek kecepatan dan status pencapaian mengalami peningkatan. Dalam satu dekade (10 tahun terakhir) IPM Papua Barat terus mengalami peningkatan, pada 2010 IPM Papua Barat hanya sebesar 59,60 menjadi 64,70 pada 2019. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat 2020 sebesar 65,09 artinya pembangunan manusia di Papua Barat berada pada kategori capaian “sedang”. IPM Papua Barat 2020 tumbuh sebesar 0,60 persen bila di bandingkan dengan capaian IPM 2019, mengalami perlambatan pertumbuhan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19. Rata-rata pertumbuhan IPM Papua Barat dari 2010-2020 sebesar 0,89 per tahun.

Perlambatan pertumbuhan IPM Papua Barat 2020 disebabkan karena menurunnya salah satu dimensi penyusun IPM yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012). pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita per tahun yang di sesuaikan (PPP), turun dari Rp 8,13 juta per tahun di 2019 menjadi hanya sebesar Rp 8.09 juta per tahun (turun sebesar 0,48 persen). Hal ini diindikasikan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 sehingga terjadi penurunan pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat yang menurun dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pengeluaran masyarakat, ini dapat dilihat dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) pada PDRB menurut Pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen (konsumsi masyarakat mengalami penurunan) dibandingkan dengan tahun 2019.

Disisi lain, dua dimensi penyusun IPM Papua Barat tetap tumbuh positif di tengah masa pandemi covid-19. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup (UHH) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sepanjang satu dekade (2010 hingga 2020). Umur harapan hidup (UHH) Papua Barat 2010 adalah 64,59 tahun meningkat menjadi 66,02 tahun di 2020 atau tumbuh sebesar 0,18 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan bila di dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (2019 terhadap 2018) yang mampu tumbuh hingga 0,53 persen.

Dimensi pengetahuan yang diukur oleh dua indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Dua indikator ini juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sepanjang satu dekade (2010 hingga 2020). HLS Papua Barat meningkat sebesar 1,81 tahun atau tumbuh sebesar 1,49 persen di 2020, mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibanding dengan tahun sebelumnya (2019 terhadap 2018) yang mampu tumbuh sebesar 1,52 persen. Sejalan dengan itu, RLS Papua Barat juga mengalami peningkatan sebesar 0,83 tahun, mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen, melambat bila di dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 2,34 persen. Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada HLS dan RLS diakibatkan juga oleh masa pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang 2020.

## **2.6 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Papua Barat**

Penyusunan IPK didasarkan pada umpan balik dari keberhasilan perencanaan tenaga kerja yang telah dilakukan daerah (provinsi) Indikator penilaian yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari hasil pengukuran IPK, ada empat isu yang harus digenjut dalam indikator utama IPK yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial Empat indikator itu masih cukup rendah, jadi harus digenjut melalui periodisasi program lebih baik dan alokasi anggaran lebih memadai.

## **2.7 Pengendalian COVID-19 di Provinsi Papua Barat**

Penanganan pandemi di Provinsi Papua Barat terus membaik. Perkembangan kasus Covid-19 terus menurun dan menjadi Provinsi paling rendah jumlah kasus aktifnya, namun ekonominya harus terus didorong agar mulai tumbuh positif. Pertanggal 3 Oktober 2021, Dari hasil pemeriksaan laboratorium terdapat penambahan 12 Kasus Positif Covid-19. Total Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat bertambah menjadi 22.923 orang atau 16,9% dari total Jumlah orang yang telah diperiksa sebanyak 135.643 orang.

Sedangkan untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, per tanggal 12 Oktober 2021, capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini untuk dosis pertama mencapai 246.466 (30,9%) dari sasaran 797.402 dan untuk dosis kedua mencapai 153.535 (19,3%).

# **III. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES KE PROVINSI PAPUA BARAT**

## **A. BIDANG KESEHATAN**

### ***Umum***

Per tanggal 8 Oktober 2021, kondisi pandemi di tanah air termasuk di Provinsi Papua Barat terus membaik. Dalam 10 minggu terakhir, seluruh indikator penanganan Covid-19 mengalami perbaikan. Kasus baru Covid-19 pada tanggal 7 Oktober sebanyak 1.393 orang, termasuk 21 kasus baru di Papua Barat. Pelaksanaan PPKM juga terus membaik yang terbukti bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Data per 26 September 2021 menunjukkan kepatuhan masyarakat memakai masker berada di angka 92,8%; kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan tercatat di angka 91,3 %. Selain itu, dalam 2 minggu

terakhir, tidak ada lagi daerah yang berada di zona merah. Testing and tracing juga terus membaik: per 6 Oktober 2021, *positivity rate* harian sebesar 0,77 % dan ini sudah sesuai dengan standar WHO yaitu *positivity rate* harus di bawah 5%. Sebagai perbandingan angka *positivity rate* tertinggi yakni pada 22 Juni 2021 yang mencapai 51,62%.

Provinsi Papua Barat telah memberikan optimisme dengan penurunan kasus yang terus stabil dan Pemerintah Provinsi Papua Barat ymenargetkan nol kasus di akhir tahun nanti. Secara umum, terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dari data dashboard [vaksin.kemkes.go.id](https://vaksin.kemkes.go.id) cakupan pelaksanaan vaksinasi di Papua Barat sangat baik untuk kelompok tenaga kesehatan dan petugas publik, namun masih harus terus ditingkatkan untuk vaksinasi kelompok lansia, *booster* tenaga kesehatan dan juga anak usia 12-17 tahun.

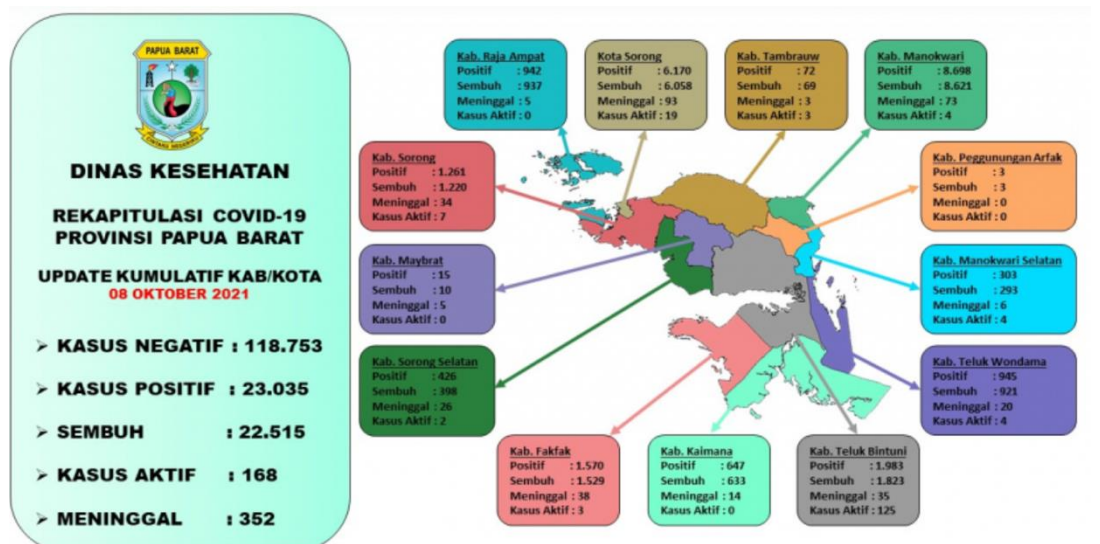
Pandemi juga telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional dan juga berimbas langsung ke perekonomian Papua Barat. Pandemi telah menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata yang juga dirasakan oleh Papua Barat. Kami prihatin ketika kami mengetahui bahwa para pemandu wisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Raja Ampat kehilangan pekerjaan. Namun, kami optimis bahwa perekonomian akan terus membaik. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tentang Perekonomian Papua Barat, pada triwulan I 2021 perekonomian Papua Barat diperkirakan tumbuh positif dan meningkat dibanding perkiraan triwulan IV 2020.

Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja memberikan perhatian sangat besar kepada Provinsi Papua Barat, khususnya untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan. Dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kami melihat adanya peningkatan sekitar 100% di tahun 2022. DAK fisik di tahun 2021 sebesar Rp 344, 23 Milyar meningkat menjadi Rp 700,89 Milyar. Kami berharap peningkatan DAK fisik ini akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat.

### Penanganan Pandemi

Pertanggal 8 Oktober 2021, kasus sembuh terus meningkat yaitu total Sembuh Covid-19 di Papua Barat saat ini mencapai 22.515 Orang atau secara persentase tingkat kesembuhan di Papua Barat mencapai 97,8%.

Untuk kasus positif, dari hasil pemeriksaan laboratorium terdapat penambahan 32 Orang Kasus Positif Covid-19, yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni 29 Orang, dan Kota Sorong 3 Orang. Total Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat bertambah menjadi 23.035 Orang atau 16,2% dari Total Jumlah orang yang telah diperiksa sebanyak 141.788 Orang.



### Pemeriksaan Laboratorium

Hingga kini, Total Orang yang telah diperiksa sebanyak 141.788 Orang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- PCR Positif (+) 23.035 Orang atau 16,2% dari Total Jumlah Orang yang telah di Periksa, berikut Rekapitulasi per Kabupaten/Kota :

1. Kab. Fak-fak 1.570 Orang
2. Kab. Kaimana 647 Orang
3. Kab. Teluk Wondama 945 Orang
4. Kab. Teluk Bintuni 1.983 Orang
5. Kab. Manokwari 8.698 Orang
6. Kab. Sorong Selatan 426 Orang
7. Kab. Sorong 1.261 Orang
8. Kab. Raja Ampat 942 Orang
9. Kab. Maybrat 15 Orang
10. Kab. Tambrau 72 Orang
11. Kab. Manokwari Selatan 303 Orang
12. Kab. Pegunungan Arfak 3 Orang
13. Kota Sorong 6.170 Orang

- PCR Negatif (-) : 118.753 Orang atau 83,8% dari Jumlah Orang yang telah di Periksa, berikut Rekapitulasi per Kabupaten/Kota :

1. Kab. Fak-fak 4.617 Orang
2. Kab. Kaimana 3.461 Orang
3. Kab. Teluk Wondama 7.564 Orang
4. Kab. Teluk Bintuni 16.307 Orang
5. Kab. Manokwari 38.445 Orang
6. Kab. Sorong Selatan 2.472 Orang
7. Kab. Sorong 10.975 Orang
8. Kab. Raja Ampat 1.791 Orang
9. Kab. Maybrat 357 Orang
10. Kab. Tambrau 234 Orang
11. Kab. Manokwari Selatan 1.513 Orang
12. Kab. Pegunungan Arfak 102 Orang
13. Kota Sorong 30.915 Orang

- Kasus Aktif : 168 Kasus di Kabupaten /Kota , berikut Rekapitulasi Kasus Aktif per Kabupaten/Kota :

1. Kab. Fak-fak 3 Kasus
2. Kab. Kaimana 0 Kasus
3. Kab. Teluk Wondama 4 Kasus
4. Kab. Teluk Bintuni 125 Kasus
5. Kab. Manokwari 4 Kasus
6. Kab. Sorong Selatan 2 Kasus
7. Kab. Sorong 7 Kasus
8. Kab. Raja Ampat 0 Kasus
9. Kab. Maybrat 0 Kasus
10. Kab. Tambrau 0 Kasus
11. Kab. Manokwari Selatan 4 Kasus



12. Kab. Pegunungan Arfak 0 Kasus
13. Kota Sorong 19 Kasus

Kasus Meninggal sebanyak 386 orang sebagai berikut:

- RT-PCR Positif 352 Orang :
  1. Kota Sorong 93 Orang
  2. Kabupaten Manokwari 73 Orang
  3. Kabupaten Bintuni 35 Orang
  4. Kabupaten Sorong Selatan 26 Orang
  5. Kabupaten Maybrat 5 Orang
  6. Kabupaten Sorong 34 Orang
  7. Kabupaten Teluk Wondama 20 Orang
  8. Kabupaten Fakfak 38 Orang
  9. Kabupaten Tambrau 3 Orang
  10. Kabupaten Raja Ampat 5 Orang
  11. Kabupaten Manokwari Selatan 6 Orang
  12. Kabupaten Pegunungan Arfak 0 Orang
  13. Kabupaten Kaimana 14 Orang

#### Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini untuk Dosis Pertama mencapai 253.547 (31,8%) dari sasaran 797.402, dan untuk Dosis Kedua mencapai 160.387 (20,1%), Update Tanggal 08 Oktober 2021.

Rekapitulasi Capaian Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Papua Barat :

Dosis Pertama :

1. Kab. Fak-Fak mencapai 19.543 Sasaran (34,3%)
2. Kab. Kaimana mencapai 11.815 Sasaran (27,3%)
3. Kab. Teluk Wondama mencapai 8.309 Sasaran (29,8%)
4. Kab. Teluk Bintuni mencapai 15.057 Sasaran (24,3%)
5. Kab. Manokwari mencapai 72.637 Sasaran (54,7%)
6. Kab. Sorong Selatan mencapai 7.230 Sasaran (19,9%)
7. Kab. Sorong mencapai 25.847 Sasaran (30,7%)
8. Kab. Raja Ampat mencapai 12.914 Sasaran (30,0%)
9. Kab. Tambrau mencapai 1.321 Sasaran (6,6%)
10. Kab. Maybrat mencapai 1.750 Sasaran (5,4%)
11. Kab. Manokwari Selatan mencapai 6.948 Sasaran (27,2%)
12. Kab. Pegunungan Arfak mencapai 123 Sasaran (0,4%)
13. Kota Sorong mencapai 70.053 Sasaran (34,4%)

Dosis Kedua :

1. Kab. Fak-Fak mencapai 11.191 Sasaran (19,6%)
2. Kab. Kaimana mencapai 7.455 Sasaran (17,2%)
3. Kab. Teluk Wondama mencapai 5.095 Sasaran (18,3%)
4. Kab. Teluk Bintuni mencapai 8.497 Sasaran (13,7%)
5. Kab. Manokwari mencapai 46.578 Sasaran (35,1%)
6. Kab. Sorong Selatan mencapai 4.061 Sasaran (11,2%)
7. Kab. Sorong mencapai 17.830 Sasaran (21,2%)
8. Kab. Raja Ampat mencapai 6.433 Sasaran (14,9%)
9. Kab. Tambrau mencapai 621 Sasaran (3,1%)
10. Kab. Maybrat mencapai 1.441 Sasaran (4,5%)
11. Kab. Manokwari Selatan mencapai 4.536 Sasaran (17,8%)
12. Kab. Pegunungan Arfak mencapai 106 Sasaran (0,3%)
13. Kota Sorong mencapai 46.543 Sasaran (22,9%)

#### **Penanganan Stunting**

Berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018, sekitar 150,8 juta atau 22,2 persen balita di dunia mengalami stunting. Indonesia mencapai 30,8 persen. Khusus di Papua Barat 27,5 persen. Pemerintah Provinsi Papua Barat 13 kabupaten dan kota di daerah tersebut sebagai prioritas penanganan kasus stunting. Di Kota Sorong, bulan Februari 2020 jumlah kasus stunting di Kota Sorong sebanyak 1.026 kasus. Namun mengalami penurunan pada bulan Februari 2021 menjadi 668 kasus. Pemerintah Kota Sorong menyelenggarakan program SIGAGU (sayang ibu sayang anak gizi) yang mengintegrasikan program pencegahan stunting. |

### **Temuan Kunjungan Kerja**

1. Pentingnya segera dibangun Rumah Sakit Pusat Kota Sorong untuk menjawab kebutuhan Rumah Sakit di Papua Barat. Percepatan ini supaya bisa menjawab kebutuhan di daerah ini, supaya pasien tidak perlu dirawat ke daerah lain.
2. Pentingnya didirikannya Rumah Sakit (RS) Pratama kelas D untuk menyokong pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Selain infrastruktur, destinasi wisata harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang memadai agar para wisatawan lebih merasa aman mengunjungi Raja Ampat. Lokasi yang diusulkan adalah di Raja Ampat bagian selatan antara Pulau Misool dengan Kota Waisai yang menjadi pusat pemerintahan Raja Ampat di mana untuk perjalanan saja membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Oleh karena itu, didirikannya RS Pratama di Raja Ampat merupakan hal yang *urgent*.
3. Kabupaten Raja Ampat juga membutuhkan penambahan puskesmas *prototype* guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang secara geografis sangat tersebar.
4. RSUD Sele Be Solu Kota Sorong masih membutuhkan dukungan pemerintah Pusat untuk melengkapi infrastruktur kesehatan khususnya dengan ditunjuknya rs menjadi rujukan pelayanan jantung. DAK fisik tahun 2022 hanya 3 M dan tidak cukup untuk meningkatkan sarana prasarana.

## **B. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **Temuan-Temuan**

1. Kota Sorong menerima alokasi dana kampung dari Presiden Joko Widodo dalam rangka mempercepat pembangunan setara dengan daerah lain melalui usulan yang sebelumnya disampaikan pada saat kunjungan Presiden ke Kota Sorong
2. Kota Sorong memiliki penduduk tercatat sejumlah 284.410 dengan pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid 19 yang positif (tidak pernah mengalami resesi) yang mengandalkan dukungan kemampuan sumber daya manusia dalam pertumbuhannya disamping memiliki sumber daya alam yang diakui belum dikelola secara optimal dengan jumlah potensi yang sangat besar.
3. Perkembangan penanganan pandemi Covid 19 pada bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Sorong cukup mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Pembangunan SDM yang diakui sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi beberapa daerah lainnya stagnan bahkan negatif di tengah pandemi Covid 19.
4. Berdasarkan statistik Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Sorong, 2020 mencapai 110.579 penduduk dengan jenis pekerjaan berusaha sendiri, dibantu pekerja tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga pada bidang usaha sebagian besar pada Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yang mencapai 29.745 pekerja, disusul Jasa Kemasyarakatan 28.746, Sosial dan Perorangan, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 21.162, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 10.955. Bidang lainnya menyusul seperti industri, konstruksi, real estate, dan pertambangan/penggalan.

5. Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid 19 antara lain pemutusan hubungan kerja, pengurangan jumlah dengan perumahan pekerja, terutama pada pekerja pelabuhan dan bandara, Pemerintah Kota Sorong menempuh kebijakan melalui dialog dengan perusahaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun untuk tetap memperkerjakan pekerja dengan sistem penggajian yang diturunkan terutama di tujukan kepada pekerja hotel dan restoran.
6. Kebijakan Pemerintah Kota Sorong selama masa lockdown untuk mencegah penyebaran Covid 19, perusahaan transportasi yang mengangkut bahan pangan ke Kota Sorong hanya boleh menurungkan bahan pangannya di pelabuhan, tetapi pekerjanya tetap di kapal.
7. Dalam menjalankan ketentuan tentang pencegahan penyebaran Covid 19 pada pekerja, ditempuh dengan meningkatkan pengawasan dengan menempatkan satpol PP pada setiap titik pengawasan dengan secara ketat menjalankan ketentuan bahwa aktivitas ekonomi hanya buka pukul 08.00 dan tutup jam 20.00 Wita.
8. Dampak atas kebijakan yang ditempuh dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan diakui cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Sorong sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif ditengah persebaran Covid 19.
9. Program pelatihan vokasional yang diselenggarakan di Papua Barat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan penekanan pelaksanaan pelatihan vokasi dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya pelatihan vokasional dilaksanakan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Sorong. Disamping BLK Kota Sorong, yang merupakan BLK milik Pemkot, Kementerian Ketenagakerjaan RI, juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Pelatihan pada BLK di Kota Sorong yang melaksanakan pelatihan berbentuk paket pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi di Provinsi Papua. Jumlah pekerja yang telah dilatih pada tahun 2020 mencapai 1.920 pekerja sementara pada tahun 2021 ini sudah mencapai 1.440 pekerja.
10. Pelaksanaan program BSU (Bantuan Subsidi Upah), yang merupakan program bantuan dari pemerintah pusat bagi pekerja dengan ketentuan antara lain gaji dibawah Rp3 juta. Bantuan BSU yang telah disalurkan kepada pekerja di Prov Papua Barat, termasuk Kota Sorong, mencapai 19.075 pekerja. Berdasarkan laporan yang disampaikan, penerima BSU di Provinsi Papua Barat mencapai 98 persen.
11. Program Kartu Prakerja, dilaksanakan dengan mendorong keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti program tersebut, termasuk melalui upaya meningkatkan peran BLK UPTD, merumuskan program yang dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan di Provinsi Papua (Link and Match). Diharapkan ke depan dapat memberikan jaminan pekerjaan yg sesuai dg program pemerintah termasuk program perlindungan jaminan kehilangan pekerja (JPK) BPJS ketenagakerjaan yang dapat memberikan solusi kebutuhan link and match tersebut..
12. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua mencapai 328.217 tenaga kerja aktif yang berasal dari 4.913 Badan Usaha, Penerima Upah selain Penyelenggara Negara 51.994 pekerja, Nan ASN (Honoror) 21.755 pekerja, Aparatur Kampung 22.302 pekerja, Sektor Jasa Konstruksi mencapai 93.436 pekerja dan pekerja informal mencapai 138.730 peserta..

### ***Kesimpulan di Bidang Ketenagakerjaan***

1. Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Papua dalam masa pandemi Covid 19 ditempuh dengan memperkuat bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang saat diakui cukup berhasil memberikan pertumbuhan ekonomi Kota Sorong sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif ditengah persebaran Covid 19
2. Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid 19 antara lain pemutusan hubungan kerja, pengurangan jumlah dengan perumahan pekerja, terutama pada pekerja pelabuhan dan bandara, Pemerintah

Kota Sorong menempuh kebijakan melalui dialog dengan perusahaan dengan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun untuk tetap memperkerjakan pekerja dengan sistem penggajian yang diturunkan terutama di tujukan kepada pekerja hotel dan restoran cukup signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.

3. Penanganan pandemi Covid-19 pada bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Sorong menarik perhatian atas keberhasilan yang dicapai yang diakui mampu menjaga stabilitas ekonomi sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi beberapa daerah lainnya stagnan bahkan negatif di tengah pandemi Covid-19.
4. Pelayanan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua termasuk melalui program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja memberikan dampak positif bagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mencapai 98 persen realisasi pelaksanaan program yang dicanankan.

#### **IV. REKOMENDASI**

##### **A. BIDANG KESEHATAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi, termasuk tracing testin.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memastikan distribusi vaksin ke Papua Barat termasuk Kota Sorong sehingga ada percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 guna mencapai target 70%.
3. Komisi IX DPR RI mendukung penuh pembangunan RSUP di Kota Sorong, RS pratama kelas D di Kabupaten Raja Ampat dan puskesmas *prototype* di Kabupaten Raja Ampat guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan pelayanan KB di Provinsi Papua Barat, termasuk Kota Sorong dengan memberikan perhatian terhadap pengurangan suntik KB atau program KB lainnya.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk RSUD Sele Be Solu Kota Sorong menjadi rumah sakit rujukan pelayanan jantung.

##### **B. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

1. Perlu terus meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Papua dalam masa pandemi Covid-19 dengan memperkuat bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Sorong di tengah pandemi Covid-19
2. Terus mengupayakan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 antara lain pemutusan hubungan kerja, pengurangan jumlah dengan perumahan pekerja, terutama pada pekerja pelabuhan dan bandara, yang ditempuh dengan kebijakan dialog dengan perusahaan dengan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun untuk tetap memperkerjakan pekerja dengan sistem penggajian yang diturunkan terutama di tujukan kepada pekerja hotel dan restoran cukup signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
3. Perlu terus meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 pada bidang ketenagakerjaan yang terjadi untuk menjaga stabilitas ekonomi sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi beberapa daerah lainnya stagnan bahkan negatif di tengah pandemi Covid-19.
4. Terus meningkatkan pelayanan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan melalui program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja memberikan dampak positif bagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mencapai 98 persen realisasi pelaksanaan program yang dicanankan.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Provinsi Papua Barat ini kami sampaikan. Atas perhatian, jawaban, serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 20 Oktober 2021**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI PAPUA BARAT  
KETUA TIM**

**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA  
(A-331)**